

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PERANCANGAN

3.1 Data Fisik Kabupaten Ponorogo

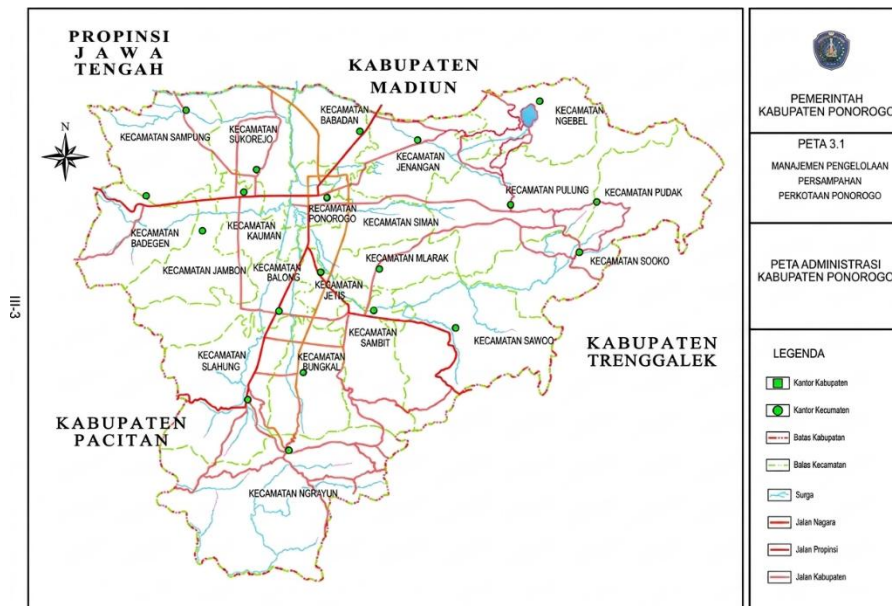
Bab ini membahas gambaran umum lokasi perancangan *Community Healing Center* di Ponorogo yang mencakup aspek fisik, non-fisik, serta kebijakan tata ruang. Analisis dilakukan secara bertahap dari skala makro hingga mikro untuk memperoleh pemahaman kontekstual terhadap lokasi perancangan.

Hasil analisis ini menjadi dasar dalam proses pemilihan tapak serta perumusan respon desain yang sesuai dengan kondisi lingkungan, sosial masyarakat, dan prinsip perancangan.

3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur bagian barat. Secara geografis, wilayah ini terletak pada koordinat $7^{\circ}49'-8^{\circ}20'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}07'-111^{\circ}52'$ Bujur Timur dengan luas sekitar 1.418,62 km² (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2025). Kabupaten Ponorogo berbatasan langsung dengan beberapa wilayah administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk.
- b. Sebelah barat : Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah).
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Pacitan.
- d. Sebelah timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek.



Gambar 3.1 Peta Administratif Wilayah Kabupaten Ponorogo

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2024

Pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo berada di Kecamatan Ponorogo yang terletak di bagian tengah wilayah. Aksesibilitas wilayah didukung oleh jaringan jalan yang menghubungkan antar daerah di Jawa Timur bagian barat serta konektivitas menuju Provinsi Jawa Tengah. Meskipun tidak dilalui jalur utama Pantura, sistem transportasi yang terdiri dari jalan nasional, provinsi, dan kabupaten tetap mampu menunjang mobilitas masyarakat serta distribusi barang secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ponorogo memiliki karakter wilayah yang cukup strategis dalam konteks konektivitas regional.

Secara administratif, Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan, 281 desa, dan 26 kelurahan yang terdata dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kecamatan dan Luas Daerah di Kabupaten Ponorogo

Kecamatan	Jumlah Kelurahan (2025)	Jumlah Desa (2025)	Luas Daerah (km ²) (2025)
Babadan	3	12	44,38
Badegan	-	10	58,05
Balong	-	20	59,73
Bungkal	-	19	58,91
Jambon	-	13	59,64
Jenangan	2	15	68,08
Jetis	-	14	23,45
Kauman	-	16	33,55
Mlarak	-	15	32,09
Ngebel	-	8	62,48
Ngrayun	-	11	172,92
Ponorogo	19	-	23,02
Pudak	-	6	64,92
Pulung	-	18	133,24
Sambit	-	16	60,48
Sampung	-	12	82,51
Sawoo	-	14	128,49
Siman	2	16	44,31
Slahung	-	22	96,62
Sooko	-	6	53,36
Sukorejo	-	18	58,39
Total	26	281	1.418,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2025

3.1.2 Kondisi Geografis Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Ponorogo memiliki kondisi wilayah yang bervariasi yang dapat ditinjau dari aspek topografi dan hidrologi. Menurut data yang tercantum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ponorogo tahun 2024, wilayah Kabupaten Ponorogo terletak pada ketinggian antara ±92–2.563 meter di atas permukaan laut dan terbagi atas beberapa relief daratan, yaitu:

- Pegunungan dan perbukitan, yang mendominasi bagian barat dan selatan, termasuk kawasan Pegunungan Wilis dan Pegunungan Seribu, meliputi wilayah Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pudak, Pulung, dan Ngebel.
- Dataran rendah yang membentang di bagian tengah hingga timur, meliputi Kecamatan Ponorogo, Babadan, Siman, Jetis, Kauman, dan sekitarnya yang menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi.

- c. Kawasan perbukitan kapur di bagian selatan-timur yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Selatan, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Badegan dan Sampung.

Wilayah Kabupaten Ponorogo didominasi oleh ketinggian antara 100–500 mdpl yang banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan permukiman. Karakteristik ini menunjukkan adanya potensi agraris yang cukup kuat, meskipun pada beberapa bagian wilayah terdapat kondisi lahan berbukit yang menjadi tantangan dalam pengembangan kawasan.

Variasi topografi tersebut menunjukkan adanya perbedaan karakter lingkungan antara kawasan terbangun dan kawasan alami, di mana wilayah dataran rendah cenderung memiliki intensitas aktivitas yang tinggi, sedangkan kawasan perbukitan dan pegunungan memiliki kondisi yang lebih tenang dan alami. Kondisi ini berpotensi dimanfaatkan dalam perancangan sebagai dasar dalam menciptakan suasana ruang yang mendukung proses pemulihan psikologis melalui pemanfaatan elemen lingkungan yang lebih natural dan tidak padat.

Sistem hidrologi di Kabupaten Ponorogo ditunjang oleh beberapa sungai utama, seperti Sungai Keyang dan Sungai Slahung, yang berperan penting sebagai sumber irigasi pertanian. Selain itu, keberadaan Waduk Bendo di Kecamatan Sawoo memiliki fungsi strategis sebagai pengendali banjir sekaligus penyedia air baku.

Keberadaan elemen air dan bentang alam alami tersebut menunjukkan potensi dalam pengolahan lanskap serta pembentukan kualitas iklim mikro yang lebih sejuk dan stabil. Dalam konteks perancangan *Community Healing Center*, kondisi ini relevan dengan pendekatan desain responsif trauma, di mana lingkungan yang alami, tenang, dan tidak menimbulkan tekanan sensorik menjadi faktor penting dalam menciptakan ruang yang nyaman dan mendukung proses *healing* pengguna.

3.1.3 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Ponorogo memiliki karakteristik iklim tropis yang dipengaruhi oleh sistem angin muson, sehingga mengalami dua musim utama,

yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan Desember hingga Februari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli hingga September.

Berdasarkan data klimatologi, suhu udara di Kabupaten Ponorogo relatif stabil sepanjang tahun dengan rata-rata suhu berkisar antara 26°C – 28°C, dengan suhu minimum sekitar 21°C – 23°C dan suhu maksimum mencapai 31°C – 33°C. Tingkat kelembaban udara berada pada kisaran 65% – 95%, dengan rata-rata sekitar 80%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ponorogo memiliki lingkungan yang cukup lembap dengan temperatur yang tidak terlalu ekstrem, sehingga kondisi tersebut tidak hanya mendukung aktivitas pertanian dan kehidupan masyarakat secara umum, tetapi juga memiliki implikasi penting dalam perancangan arsitektur, khususnya dalam menciptakan kenyamanan ruang. Dalam konteks perancangan *Community Healing Center*, stabilitas suhu dan ketersediaan sinar matahari menjadi potensi dalam penerapan strategi desain pasif, seperti optimalisasi ventilasi alami, pencahayaan alami, serta pengendalian panas dan kelembaban melalui elemen arsitektural.

Tabel 3.2 Data Iklim Ponorogo

Data iklim Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia													
Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun
Rata-rata tertinggi °C	29.9	30.1	30.4	31.2	31.2	31.3	31.1	31.6	32.6	32.7	31.8	30.8	31.23
Rata-rata harian °C	26.1	26.2	26.4	26.8	26.5	26.1	25.6	25.7	26.7	27.1	26.9	26.6	26.39
Rata-rata terendah °C	22.3	22.4	22.5	22.4	21.9	20.9	20.1	19.9	20.8	21.6	22.1	22.4	21.61
Presipitasi mm	293	296	275	209	88	54	25	13	32	70	212	267	1.834
Rata-rata hari hujan	16	16	14	11	5	3	2	1	2	4	11	14	99
% kelembapan	85	85	84	81	80	77	73	71	69	71	76	81	77.8
Kemungkinan sinar matahari (persen)	50	49	55	65	69	73	79	78	74	72	62	54	65

Sumber: WeatherSpark, 2026

Pemanfaatan bukaan bangunan, orientasi terhadap matahari, serta pengolahan elemen peneduh menjadi penting untuk menciptakan kualitas ruang yang terang, sehat, dan tidak menimbulkan tekanan visual maupun termal. Hal ini sejalan dengan prinsip desain responsif trauma yang menekankan pentingnya lingkungan dengan kualitas sensorik yang terkendali, di mana pencahayaan alami, sirkulasi udara, dan kenyamanan termal berperan dalam menghadirkan suasana ruang yang menenangkan dan mendukung proses pemulihan psikologis pengguna.

3.1.4 Penggunaan Lahan

Kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Ponorogo mencerminkan karakter wilayah yang didominasi oleh sektor agraris dengan dukungan vegetasi alami yang cukup luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik serta hasil interpretasi citra satelit SPOT 7 tahun 2018 yang telah melalui verifikasi lapangan, penggunaan lahan di wilayah ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain lahan sawah, pertanian bukan sawah (tegalan dan perkebunan), serta lahan non-pertanian seperti permukiman, industri, dan fasilitas umum. Selain itu, terdapat pula penggunaan lahan lain seperti belukar, hutan campuran, badan air, dan lahan terbuka.

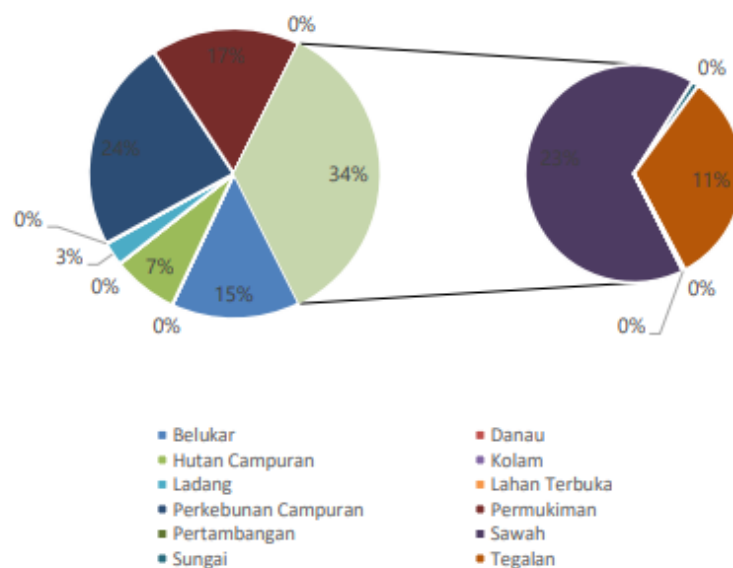
Secara umum, penggunaan lahan di Kabupaten Ponorogo didominasi oleh perkebunan campuran, sawah, dan permukiman. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas utama masyarakat masih bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan sebagai penopang perekonomian daerah, sekaligus mencerminkan adanya keseimbangan antara lingkungan terbangun dan lingkungan alami yang masih cukup terjaga. Keberadaan hutan campuran, belukar, serta lahan terbuka juga mengindikasikan bahwa sebagian wilayah masih memiliki kualitas ekologis yang baik.

Rincian luas penggunaan lahan Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Tabel 3.4, sedangkan distribusi persentasenya disajikan pada Gambar 3.2.

Tabel 3.3 Penggunaan Lahan Kabupaten Ponorogo

Penggunaan Lahan	Km ²	Hektar
Belukar	204.36	20436.0
Danau	0.02	2.0
Hutan Campuran	104.32	10432.0
Kolam	0.03	3.0
Ladang	37.07	3707.0
Lahan Terbuka	1.11	111.0
Perkebunan Campuran	335.78	33578.0
Permukiman	236.2	23620.0
Pertambangan	0.26	26.0
Sawah	331.64	33164.0
Sungai	5.01	501.0
Tegalan	160.65	16065.0
Telaga	1.44	144.0
Waduk	0.31	31.0

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo, 2022



Gambar 3.2 Presentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Ponorogo

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ponorogo, 2022

Keberadaan lahan pertanian dan vegetasi alami tersebut menjadi potensi penting dalam mendukung konsep *healing*, khususnya melalui penyediaan visual hijau, kualitas udara yang lebih baik, serta suasana ruang yang lebih tenang dibandingkan kawasan perkotaan padat. Elemen-elemen alami ini dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi

desain dalam menciptakan lingkungan yang menenangkan, mengurangi tingkat stres, serta mendukung kenyamanan psikologis pengguna.

Dengan demikian, karakter penggunaan lahan di Kabupaten Ponorogo tidak hanya menggambarkan kondisi eksisting wilayah, tetapi juga memberikan dasar dalam perancangan *Community Healing Center* yang mengintegrasikan elemen alam sebagai bagian dari proses pemulihan psikososial melalui pendekatan desain responsif trauma.

3.2 Data Non Fisik Kabupaten Ponorogo

3.2.1 Kependudukan

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 mencapai sekitar 979.008 jiwa, terdiri dari 486.147 laki-laki dan 492.861 perempuan. Penduduk tersebut tersebar di 21 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Persebaran penduduk di Kabupaten Ponorogo cenderung tidak merata, dengan konsentrasi terbesar berada di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Ponorogo sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Sementara itu, wilayah pegunungan seperti Ngebel dan Sooko memiliki kepadatan penduduk yang relatif lebih rendah, hal ini dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk		
	L	P	Jumlah
Babadan	35.238	35.744	70.982
Badegan	17.280	17.275	34.555
Balong	23.907	24.797	48.704
Bungkal	19.439	20.194	39.633
Jambon	24.130	24.192	48.322
Jenangan	31.039	31.607	62.646
Jetis	16.026	16.205	32.231
Kauman	23.686	24.036	47.722
Mlarak	17.887	18.268	36.155
Ngebel	10.907	10.923	21.83
Ngrayun	31.581	30.923	62.504
Ponorogo	38.367	38.930	77.297
Pudak	4.793	4.817	9.61
Pulung	26.485	27.021	53.506
Sambit	20.488	20.793	41.281
Sampung	20.215	20.645	40.86
Sawoo	31.467	31.762	63.229
Siman	24.195	24.379	48.574
Slahung	27.284	27.669	54.953
Soko	12.181	12.555	24.736
Sukorejo	29.552	30.126	59.678
Total	486.147	492.861	979.008

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2026

Kondisi persebaran ini menunjukkan adanya perbedaan intensitas aktivitas sosial antar wilayah, di mana kawasan perkotaan memiliki tingkat interaksi, mobilitas, dan dinamika sosial yang lebih tinggi. Hal tersebut berimplikasi pada meningkatnya tekanan aktivitas serta potensi permasalahan sosial, terutama pada wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

Dalam konteks perancangan *Community Healing Center*, kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan terhadap fasilitas yang mampu mengakomodasi pemulihan psikologis masyarakat, khususnya pada kawasan dengan intensitas aktivitas tinggi. Kepadatan dan kompleksitas interaksi sosial dapat menjadi salah satu faktor pemicu stres, sehingga diperlukan ruang yang mampu memberikan rasa aman, kenyamanan, serta dukungan psikososial bagi pengguna.

Hal ini sejalan dengan pendekatan desain responsif trauma yang menekankan pentingnya penyediaan lingkungan yang mampu mereduksi tekanan sosial melalui pengaturan ruang yang jelas, tingkat privasi yang

terjaga, serta kualitas lingkungan binaan yang mendukung kenyamanan psikologis.

3.2.2 Pendidikan

Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 tercatat memiliki infrastruktur pendidikan yang terdiri dari sekolah negeri, swasta, serta pendidikan setara yang tersebar di 21 kecamatan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, jumlah satuan pendidikan meliputi 696 unit SD sederajat, 189 unit SMP sederajat, dan 26 unit SMA sederajat.

Sebaran fasilitas pendidikan ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan dasar masih mendominasi dibandingkan pendidikan menengah atas. Hal ini mengindikasikan bahwa akses terhadap pendidikan dasar relatif merata, sementara ketersediaan fasilitas pendidikan menengah atas masih terbatas di beberapa wilayah, terutama pada kecamatan dengan kondisi geografis perbukitan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Satuan Pendidikan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025

Kecamatan	Satuan Pendidikan (Negeri, Swasta, & Pendidikan Setara)		
	SD	SMP	SMA
Babadan	41	13	2
Badegan	24	5	-
Balong	34	9	2
Bungkal	31	8	1
Jambon	30	8	1
Jenangan	44	15	2
Jetis	26	9	2
Kauman	29	6	1
Mlarak	31	10	1
Ngebel	18	4	-
Ngrayun	49	18	2
Ponorogo	40	24	7
Pudak	8	1	-
Pulung	45	7	1
Sambit	32	6	1
Sampung	35	8	1
Sawoo	43	11	-
Siman	30	5	1
Slahung	43	12	1
Sooko	22	3	-
Sukorejo	41	7	-
Total	696	189	26

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2026

Kondisi tersebut tidak hanya berpengaruh pada aspek pendidikan formal, tetapi juga berkaitan dengan tingkat literasi masyarakat secara umum, termasuk dalam memahami isu kesehatan mental dan psikososial. Keterbatasan akses pendidikan lanjutan berpotensi mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental serta cara penanganannya.

Dalam konteks perancangan *Community Healing Center*, kondisi ini menunjukkan pentingnya penyediaan fasilitas yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang terapi, tetapi juga sebagai ruang edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental. Oleh karena itu, perancangan perlu mengakomodasi ruang-ruang edukatif yang bersifat inklusif, mudah diakses, serta mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep desain responsif trauma yang tidak hanya berfokus pada pemulihan, tetapi juga pada aspek preventif melalui edukasi, peningkatan literasi, serta pembentukan lingkungan yang suportif terhadap kesehatan psikososial masyarakat.

3.2.3 Komunitas dan Kegiatan Sosial

Kabupaten Ponorogo memiliki karakter masyarakat yang kuat dalam nilai kebersamaan dan gotong royong. Kehidupan sosial masyarakat ditunjang oleh keberadaan berbagai komunitas yang aktif di tingkat desa maupun kecamatan. Komunitas tersebut meliputi komunitas seni, keagamaan, kepemudaan, serta komunitas sosial kemasyarakatan lainnya.

Komunitas seni di Ponorogo berkembang cukup pesat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kesenian tradisional seperti Reog Ponorogo, jathilan, dan karawitan masih dilestarikan melalui sanggar-sanggar seni yang tersebar di berbagai wilayah. Kegiatan latihan dan pementasan rutin menjadi sarana ekspresi budaya sekaligus mempererat hubungan sosial antarwarga.

Selain itu, komunitas keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan seperti pengajian, yasinan,

majelis taklim, serta peringatan hari besar keagamaan dilaksanakan secara rutin dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Di bidang kepemudaan, organisasi Karang Taruna hampir terdapat di setiap desa dan berfungsi sebagai wadah pengembangan generasi muda melalui berbagai kegiatan sosial, olahraga, dan kemasyarakatan. Sementara itu, komunitas sosial dan relawan turut berperan dalam kegiatan kemanusiaan seperti bantuan sosial dan penanggulangan bencana.

Keberadaan komunitas-komunitas tersebut menunjukkan bahwa interaksi sosial masyarakat Ponorogo berlangsung secara aktif, terorganisir, serta didukung oleh nilai solidaritas yang tinggi. Kondisi ini mencerminkan karakter komunal yang kuat dengan potensi interaksi sosial yang intens dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 3.6 Komunitas dan Kegiatan Sosial Kabupaten Ponorogo

Jenis Komunitas	Bentuk Kegiatan	Persebaran	Keterangan
Komunitas Seni	Pertunjukan Reog, jathilan, karawitan, sanggar seni.	Seluruh kecamatan.	Kegiatan pelestarian seni dan budaya.
Komunitas Keagamaan	Pengajian, yasinan, majelis taklim.	Desa dan kelurahan.	Kegiatan keagamaan rutin masyarakat.
Karang Taruna	Kegiatan kepemudaan, bakti sosial, olahraga.	Tingkat desa/kelurahan.	Oraganisasi kepemudaan berbasis masyarakat.
Komunitas Sosial	Kegiatan sosial dan kemanusiaan.	Perkotaan dan pedesaan.	Lembaga kesejahteraan sosial masyarakat.

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo, 2026

Dalam konteks perancangan *Community Healing Center*, di mana proses pemulihan tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga melalui dukungan sosial dari komunitas. Interaksi sosial yang positif berperan sebagai sistem dukungan (*support system*) yang dapat membantu mengurangi tekanan psikologis serta mempercepat proses pemulihan pengguna.

Oleh karena itu, perancangan ruang perlu mengakomodasi aktivitas komunal melalui penyediaan ruang interaksi, ruang kegiatan bersama, serta ruang terbuka yang fleksibel dan inklusif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip desain responsif trauma yang menekankan pentingnya lingkungan suportif, rasa keterhubungan sosial, serta keberadaan ruang yang

memungkinkan pengguna merasa diterima dan tidak terisolasi dalam proses *healing*.

3.2.4 Kondisi Kesehatan dan Psikososial

Kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Ponorogo mencakup aspek fisik dan psikososial. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap kondisi psikososial masyarakat semakin meningkat, terutama terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), jumlah kasus kekerasan di Ponorogo menunjukkan relatif stabil setiap tahunnya, yang mengindikasikan adanya permasalahan sosial yang masih memerlukan penanganan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, fasilitas kesehatan di Kabupaten Ponorogo terdiri dari rumah sakit, puskesmas, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang tersebar di berbagai kecamatan. Namun, layanan yang secara khusus menangani aspek psikologis dan konseling masih terbatas dan umumnya terintegrasi dalam fasilitas kesehatan umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Ponorogo masih didominasi oleh layanan fisik, sementara layanan psikososial belum berkembang secara optimal.

Tabel 3.7 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Ponorogo

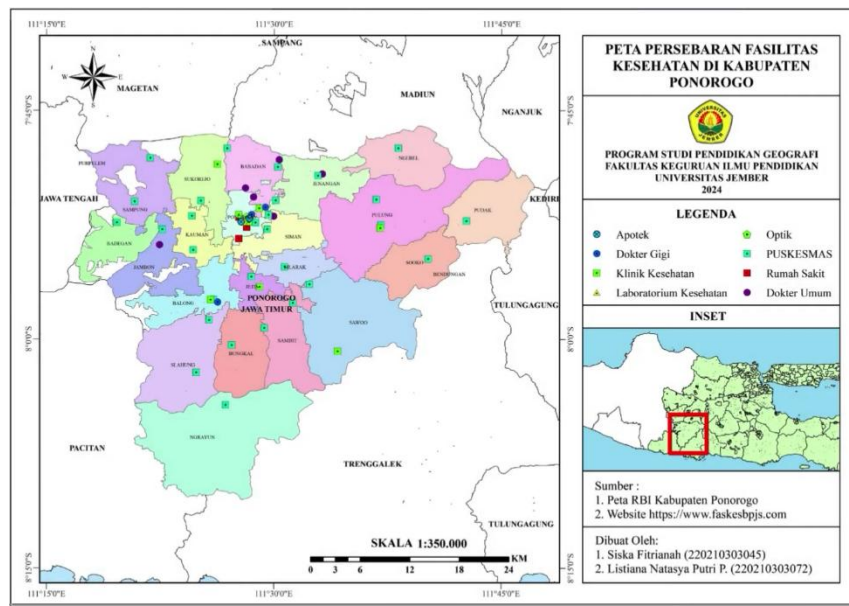
Tahun	Jumlah
2021	54 kasus
2022	62 kasus
2023	60 kasus
2024	63 kasus
2025	59 kasus

Sumber: Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo, 2026

Tabel 3.8 Fasilitas Kesehatan di Ponorogo

Jenis Fasilitas	Jumlah	Keterangan
Rumah Sakit	8	Rumah Sakit umum dan khusus.
Puskesmas	31	Puskesmas rawat inap dan non rawat inap.
Klinik	49	Klinik Pratama
Layanan Konseling	Terbatas	Umumnya di RS dan Puskesmas.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2024



Gambar 3.3 Peta Persebaran Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Ponorogo

Sumber: Pendidikan Geografi UNEJ, 2024

Kondisi psikososial masyarakat yang ditandai dengan adanya kasus kekerasan serta keterbatasan layanan kesehatan mental tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap fasilitas pemulihan psikologis masih belum terpenuhi secara optimal. Layanan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna secara komprehensif, baik dari aspek terapi, edukasi, maupun dukungan sosial.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa penanganan permasalahan psikososial tidak cukup hanya melalui pendekatan medis konvensional, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis komunitas. Dalam hal ini, perancangan *Community Healing Center* menjadi relevan sebagai fasilitas yang mampu mengakomodasi kebutuhan konseling, terapi, edukasi, serta interaksi sosial dalam satu kesatuan lingkungan.

Pendekatan desain responsif trauma menjadi penting untuk diterapkan, karena mampu menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tidak bersifat klinis. Melalui pengaturan ruang yang memperhatikan aspek keamanan, privasi, kontrol pengguna, serta kenyamanan sensorik, desain

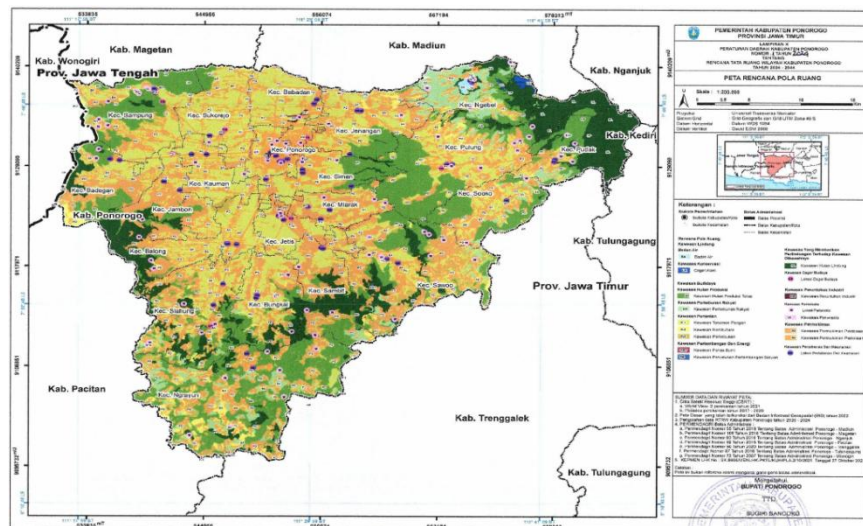
diharapkan mampu mendukung proses pemulihan tanpa memicu stres atau trauma ulang.

Dengan demikian, perancangan *Community Healing Center* tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan kesehatan mental, tetapi juga sebagai lingkungan pemulihan yang suportif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan psikologis masyarakat secara holistik.

3.3 Tinjauan Lokasi Kabupaten Ponorogo

3.3.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ponorogo merupakan pedoman dalam pengaturan pemanfaatan ruang wilayah guna mendukung pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. RTRW ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044 (JDIH DPRD Ponorogo, 2024).



Gambar 3.4 Peta Rencana Tata Ruang di Kabupaten Ponorogo

Sumber: JDIH DPRD Ponorogo, 2024

Dalam ketentuan RTRW tersebut, pengembangan fasilitas pelayanan masyarakat termasuk dalam kategori Pusat Pelayanan Kawasan, sebagaimana diatur dalam ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kawasan. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024

Pasal 90 ayat (1) huruf b, yang mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan perkotaan dengan fungsi pelayanan berskala kecamatan (JDIH DPRD Ponorogo, 2024).

Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pusat pemerintahan kota, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan perikanan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur; dan
 2. penanggulangan bencana, cagar budaya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan lain yang mendukung fungsi Pusat Pelayanan Kawasan serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok Pusat Pelayanan Kawasan;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. menetapkan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman kota, taman median jalan, dan taman hutan kota yang dikembangkan pada kawasan perkotaan dengan luasan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat; dan
 2. mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, berupa ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat

Pelayanan Kawasan yaitu fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala Kecamatan terdiri atas:

1. jalan kolektor;
2. terminal penumpang tipe C;
3. rumah sakit kelas C atau kelas D;
4. fasilitas jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
5. pasar induk Kecamatan;
6. fasilitas pelayanan umum pemerintahan Kecamatan antara lain kantor pelayanan kependudukan dan catatan sipil, kantor pelayanan perizinan, kantor pelayanan administrasi pemerintahan Kecamatan, dan kantor kepolisian;
7. fasilitas ketenagalistrikan;
8. fasilitas air minum;
9. fasilitas telekomunikasi; dan
10. jasa perbankan, industri perhotelan, dan jasa lainnya.

3.3.2 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

Ketentuan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kabupaten Ponorogo mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 pasal 109 ayat (1) huruf d, untuk kegiatan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada kawasan permukiman perkotaan, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketinggian Bangunan : 3-4 Lantai (sekitar 12–15 meter)
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : Maksimal 360%
- c. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : Maksimal 60%
- d. Koefisien Dasar Hijau (KDH) : Minimal 40%
- e. Garis Sempadan Jalan : Minimal 12 meter dari as jalan

Berdasarkan ketentuan RTRW dan RTBL tersebut, pengembangan *Community Healing Center* termasuk dalam kategori fasilitas pelayanan masyarakat yang diperbolehkan pada kawasan perkotaan. Ketentuan ini menjadi dasar legal dan teknis dalam pemilihan lokasi serta pengembangan desain yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3.4 Pertimbangan Pemilihan Lokasi Tapak

Pemilihan lokasi tapak dalam perancangan *Community Healing Center* di Kabupaten Ponorogo dilakukan secara bertahap melalui pendekatan komparatif berbasis kriteria dan parameter yang mengacu pada kebijakan tata ruang serta karakteristik sosial masyarakat. Penentuan lokasi tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik lahan, tetapi juga kesesuaian lingkungan dalam mendukung proses pemulihan psikososial berbasis komunitas. Oleh karena itu, pemilihan lokasi dilakukan melalui tahapan penyaringan wilayah dari skala kecamatan hingga tapak spesifik untuk memperoleh lokasi yang paling optimal.

3.4.1 Parameter dan Kriteria Pemilihan Lokasi

Parameter pemilihan lokasi disusun berdasarkan arahan RTRW Kabupaten Ponorogo, RPJMD Kabupaten Ponorogo, serta prinsip perencanaan fasilitas sosial dan *healing environment*, sehingga memiliki dasar kebijakan dan teoritis yang jelas.

Tabel 3.9 Parameter dan Kriteria Pemilihan Lokasi

Parameter	Kriteria
Kesesuaian Tata Ruang (RTRW)	Lokasi berada pada kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi fasilitas umum dan sosial serta tidak termasuk kawasan lindung. Sumber: JDIH DPRD Ponorogo, 2024
Aksesibilitas	Kemudahan pencapaian lokasi melalui jaringan jalan utama serta keterhubungan dengan pusat aktivitas kota. Sumber: Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2021
Karakter Sosial Masyarakat	Lingkungan memiliki interaksi sosial yang aktif dan budaya komunal yang mendukung pendekatan berbasis komunitas. Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo 2021–2026
Kondisi Lingkungan (<i>Healing Environment</i>)	Lingkungan relatif tenang, tidak bising, serta memiliki potensi elemen alami. Sumber: teori <i>healing environment</i> Zhang et al., 2022
Kedekatan dengan Fasilitas Pendukung	Dekat dengan permukiman dan fasilitas sosial sehingga mendukung aksesibilitas pengguna. Sumber : Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020

Sumber: JDIH DPRD Ponorogo, 2024; Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2021; RPJMD Kabupaten Ponorogo 2021–2026; Zhang et al., 2022; Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020

Sistem penilaian dalam proses pemilihan lokasi tapak dilakukan untuk mengukur tingkat kesesuaian masing-masing alternatif wilayah berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Parameter tersebut disusun dengan mengacu pada kebijakan tata ruang dalam RTRW Kabupaten Ponorogo, dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, serta prinsip perencanaan fasilitas publik dan *healing environment*. Penilaian dilakukan secara komparatif dengan menggunakan skala numerik untuk menghasilkan keputusan yang lebih objektif, dan terukur. Adapun sistem penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

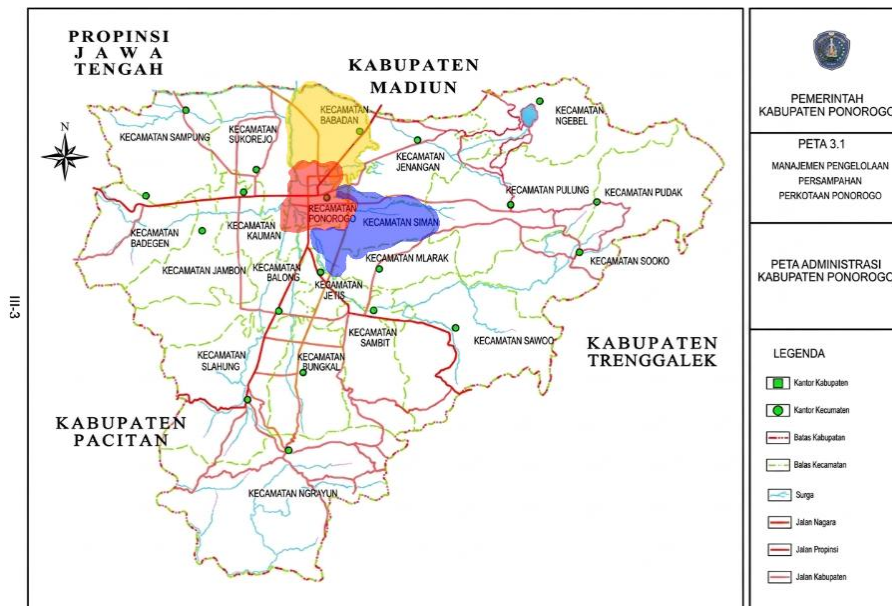
Tabel 3.10 Sistem Penilaian

Nilai	Keterangan
4	Sangat Sesuai
3	Sesuai
2	Cukup Sesuai
1	Kurang Sesuai

Penilaian dilakukan secara komparatif berdasarkan tingkat kesesuaian masing-masing lokasi terhadap parameter yang telah ditetapkan. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi dengan potensi paling optimal dalam mendukung fungsi *Community Healing Center*, baik dari aspek aksesibilitas, lingkungan, maupun karakter sosial masyarakat.

3.4.2 Perbandingan Kecamatan

Berdasarkan parameter yang telah ditetapkan, dilakukan proses seleksi lokasi secara bertahap dimulai dari skala kecamatan sebagai bentuk penyaringan awal wilayah potensial. Berdasarkan kriteria tersebut, dilakukan perbandingan beberapa kecamatan yang memiliki potensi pengembangan fasilitas, yaitu Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Siman, dan Kecamatan Babadan.



Gambar 3.5 Peta Administratif Kabupaten Ponorogo
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2024

Tabel 3.11 Perbandingan Kecamatan

Parameter	Kecamatan		
	Ponorogo	Siman	Babadan
Kesesuaian Tata Ruang (RTRW)	4	3	3
Aksesibilitas	4	3	3
Karakter Sosial Masyarakat	4	3	3
Kondisi Lingkungan (<i>Healing Environment</i>)	3	4	3
Kedekatan dengan Fasilitas Pendukung	4	3	3
Total	19	16	15

Penilaian terhadap masing-masing kecamatan dilakukan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting wilayah.

Kecamatan Ponorogo memperoleh nilai tertinggi terutama pada aspek aksesibilitas dan fasilitas pendukung karena merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi, sehingga memiliki jaringan jalan yang lebih baik serta kelengkapan fasilitas publik yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Selain itu, karakter sosial masyarakat yang dinamis dengan intensitas interaksi yang tinggi memberikan potensi besar dalam mendukung pendekatan berbasis komunitas.

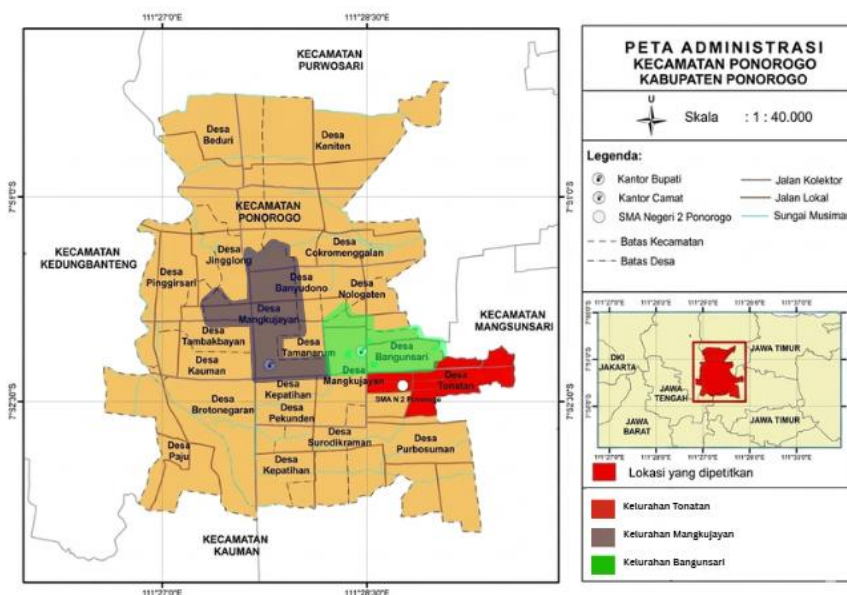
Kecamatan Siman memiliki kondisi lingkungan yang relatif lebih tenang sehingga memperoleh nilai lebih pada aspek lingkungan. Namun, dari sisi aksesibilitas dan fasilitas pendukung masih berada di bawah Kecamatan Ponorogo karena tidak sepenuhnya menjadi pusat aktivitas utama.

Sementara itu, Kecamatan Babadan memiliki karakteristik yang relatif mirip dengan Siman, namun dengan tingkat aktivitas sosial dan aksesibilitas yang lebih rendah, sehingga nilai yang diperoleh juga lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kecamatan Ponorogo dipilih sebagai lokasi yang paling sesuai untuk pengembangan *Community Healing Center*.

3.4.3 Perbandingan Kelurahan

Selanjutnya dilakukan perbandingan pada tingkat kelurahan di Kecamatan Ponorogo, yaitu Kelurahan Tonatan, Kelurahan Bangunsari, dan Kelurahan Mangkujayan.



Gambar 3.6 Peta Administratif Kecamatan Ponorogo

Sumber: Sholikah, S. N. H., 2021

Tabel 3.12 Perbandingan Kelurahan

Parameter	Kecamatan		
	Tonatan	Bangunsari	Mangkujayan
Kesesuaian Tata Ruang (RTRW)	4	3	4
Aksesibilitas	4	3	3
Karakter Sosial Masyarakat	4	3	3
Kondisi Lingkungan (<i>Healing Environment</i>)	3	4	2
Kedekatan dengan Fasilitas Pendukung	4	3	2
Total	19	16	14

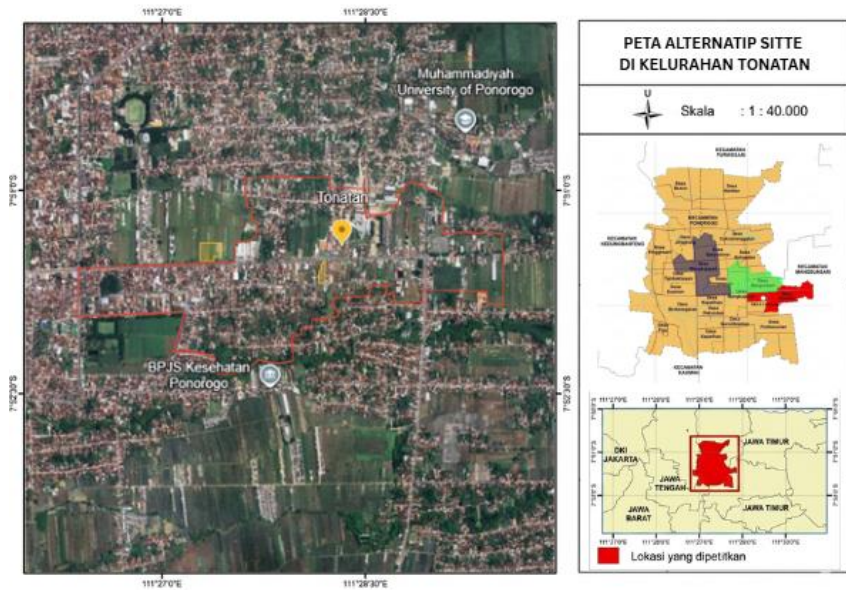
Pada tingkat kelurahan, penilaian menunjukkan bahwa Kelurahan Tonatan memiliki nilai tertinggi dibandingkan alternatif lainnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi aksesibilitas yang baik karena terhubung dengan jaringan jalan utama menuju pusat kota, serta berada pada kawasan dengan aktivitas sosial masyarakat yang cukup tinggi.

Selain itu, ketersediaan lahan di Kelurahan Tonatan relatif lebih mendukung untuk pengembangan fasilitas dibandingkan dengan Kelurahan Mangkujayan yang memiliki keterbatasan ruang dan kondisi lingkungan yang lebih padat. Kelurahan Bangunsari memiliki kondisi yang cukup baik, namun tidak sekuat Tonatan dalam aspek aksesibilitas dan potensi pengembangan lahan.

Dengan demikian, Kelurahan Tonatan dipilih sebagai lokasi tapak karena memiliki keseimbangan antara aspek fisik, sosial, dan aksesibilitas yang mendukung pengembangan *Community Healing Center*.

3.5 Alternatif Tapak Perencanaan

Berikut menunjukkan Peta alternatif tapak pada lokasi kedua site yang berada di Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, serta keterkaitannya dengan konteks kawasan di sekitarnya.



Gambar 3 7 Peta Alternatif Site

Sumber: Google Earth, 2026

3.5.1 Alternatif 1

Site alternatif 1 berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Tapak ini merupakan persawahan aktif dengan penutup lahan didominasi vegetasi alami seperti tanaman padi dan beberapa pohon yang tersebar.



Gambar 3.8 Site Alternatif 1

Sumber: Google Earth, 2026

1. Sarana dan Prasarana

Lokasi tapak berada pada koridor Jl. Ir. H. Juanda yang merupakan salah satu jalur penghubung menuju pusat Kota Ponorogo. Kawasan di sekitar tapak didominasi oleh permukiman serta didukung oleh keberadaan fasilitas umum seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan area perdagangan skala lingkungan. Infrastruktur jalan telah memadai untuk mendukung akses kendaraan pribadi maupun transportasi lokal.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo 2024–2044, tapak berada pada zona kawasan permukiman perkotaan (warna *orange*) yang diperuntukkan bagi pengembangan hunian beserta fasilitas pendukungnya, termasuk fasilitas sosial dan pelayanan masyarakat.

2. Kondisi Lingkungan

Lingkungan sekitar tapak menunjukkan karakter kawasan transisi antara area perkotaan dan lahan pertanian. Pada bagian utara dan timur masih terdapat persawahan aktif, sedangkan bagian barat telah berkembang menjadi kawasan permukiman. Kondisi ini menciptakan suasana lingkungan yang relatif terbuka, tidak padat, serta memiliki tingkat kebisingan yang lebih terkendali.

Dari aspek *healing* environment, keberadaan elemen alami seperti vegetasi dan ruang terbuka memberikan potensi dalam menciptakan suasana yang tenang, nyaman, dan mendukung proses pemulihan psikologis.

3. Spesifik Tapak

a. Batasan Tapak:

- Utara: Area Persawahan Aktif dan Permukiman Warga.
- Selatan: Jl. Ir. H. Juanda dan Permukiman Warga.
- Timur: Area Persawahan Aktif dan *Ponorogo City Center*.
- Barat: Kawasan Permukiman Warga dan Ruko-ruko.

b. Luas Lahan: $\pm 11.717,9 \text{ m}^2$

c. Karakter Tapak:

Tapak memiliki orientasi utama ke arah selatan yang menghadap langsung ke jalan utama, sehingga memberikan keuntungan dalam aspek visibilitas, pencapaian, serta potensi optimalisasi pencahayaan alami dan ventilasi silang. Selain itu, kondisi lahan yang relatif luas memberikan fleksibilitas dalam pengolahan zoning berlapis sesuai dengan kebutuhan desain berbasis *healing environment* dan pendekatan *trauma-informed design*.

3.5.2 Alternatif 2

Site alternatif 2 berlokasi di Jl. Sekar Putih Timur, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Tapak ini berada di area yang berhadapan dengan Warkop STW dan merupakan lahan kosong yang belum terbangun.



Gambar 3.9 Site Alternatif 2

Sumber: Google Earth, 2026

1. Sarana dan Prasarana

Tapak berada pada jaringan jalan lingkungan yang terhubung dengan jalan utama Jl. Ir. H. Juanda. Kawasan di sekitarnya berkembang sebagai area permukiman dengan keberadaan aktivitas komersial skala

kecil seperti warung dan usaha lokal. Infrastruktur dasar seperti akses jalan, jaringan listrik, dan utilitas lingkungan sudah tersedia, meskipun tidak seintensif pada koridor jalan utama.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Ponorogo 2024–2044, lokasi tapak juga berada pada zona kawasan permukiman perkotaan (*zona orange*) yang memungkinkan pengembangan fasilitas sosial dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, secara regulatif tapak ini tetap memenuhi kriteria peruntukan lahan.

2. Kondisi Lingkungan

Lingkungan sekitar tapak didominasi oleh kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan sedang serta aktivitas sosial masyarakat yang cukup aktif. Dibandingkan dengan alternatif 1, kondisi lingkungan pada tapak ini cenderung lebih terbangun dan memiliki tingkat kebisingan yang relatif lebih tinggi akibat aktivitas harian masyarakat dan keberadaan fungsi komersial di sekitarnya.

Dari aspek *healing* environment, tapak ini memiliki keterbatasan dalam penyediaan elemen alami karena minimnya vegetasi eksisting, sehingga memerlukan intervensi desain yang lebih intensif untuk menciptakan suasana terapeutik.

3. Spesifik Tapak

a. Batasan Tapak:

- Utara: Permukiman Warga
- Selatan: Jl. Sekar Putih Timur dan Warkop STW
- Timur: Permukiman Warga
- Barat: Permukiman Warga

b. Luas Lahan: $\pm 3.260 \text{ m}^2$

c. Karakter Tapak:

Tapak memiliki skala yang lebih kecil dibandingkan alternatif 1 sehingga lebih terbatas dalam pengembangan ruang luar dan penerapan zoning berlapis. Meskipun demikian, lokasi ini masih

memiliki potensi dari sisi kedekatan dengan komunitas serta kemudahan akses bagi masyarakat sekitar.

3.5.3 Penetapan Tapak

Pemilihan tapak dalam perancangan *Community Healing Center* di Kabupaten Ponorogo dilakukan melalui proses penyaringan secara bertahap, dimulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga identifikasi alternatif tapak pada lokasi terpilih. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tapak yang dipilih tidak hanya memenuhi kriteria administratif dan regulatif, tetapi juga memiliki kesesuaian kontekstual terhadap kebutuhan perancangan.

Berdasarkan proses tersebut, diperoleh dua alternatif tapak di Kelurahan Tonatan yang kemudian dibandingkan menggunakan parameter yang telah ditetapkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif tapak 1 lebih unggul dibandingkan alternatif tapak 2, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kesesuaian Tata Ruang (RTRW)

Kedua alternatif tapak berada pada zona kawasan permukiman perkotaan (zona *orange*) berdasarkan RTRW Kabupaten Ponorogo 2024–2044, yang diperuntukkan bagi pengembangan fasilitas sosial dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, kedua tapak telah memenuhi aspek kesesuaian tata ruang.

2. Aksesibilitas

Alternatif tapak 1 memiliki aksesibilitas yang lebih baik karena berada di koridor jalan utama Jl. Ir. H. Juanda, sehingga mudah dijangkau dan memiliki visibilitas tinggi. Alternatif tapak 2 berada pada jalan lingkungan dengan skala lebih kecil, sehingga tingkat pencapaiannya lebih terbatas.

3. Karakter Sosial Masyarakat

Kedua tapak berada pada lingkungan permukiman dengan aktivitas sosial yang cukup aktif dan mendukung pendekatan berbasis komunitas. Namun, alternatif tapak 1 memiliki potensi jangkauan pengguna yang lebih luas karena kedekatannya dengan pusat aktivitas kawasan.

4. Kondisi Lingkungan (*Healing Environment*)

Alternatif tapak 1 memiliki kondisi lingkungan yang lebih mendukung karena berada pada kawasan transisi antara permukiman dan lahan terbuka, sehingga relatif lebih tenang, tidak padat, dan memiliki potensi elemen alami. Alternatif tapak 2 cenderung berada pada lingkungan yang lebih padat dengan keterbatasan ruang terbuka.

5. Kedekatan dengan Fasilitas Pendukung

Kedua tapak memiliki kedekatan dengan fasilitas umum dan kawasan permukiman. Namun, alternatif tapak 1 memiliki konektivitas yang lebih baik terhadap fasilitas kota sehingga lebih mendukung operasional dan akses pengguna.

Berdasarkan kelima parameter tersebut, alternatif tapak 1 menunjukkan tingkat kesesuaian yang lebih tinggi, terutama pada aspek aksesibilitas dan kondisi lingkungan yang menjadi faktor utama dalam perancangan *Community Healing Center*.

Dengan demikian, alternatif tapak 1 yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda dipilih sebagai tapak perencanaan, karena dinilai paling optimal dalam memenuhi kebutuhan perancangan baik secara teknis, kontekstual, maupun konseptual.

3.6 Tapak terpilih

Tapak terpilih dalam perancangan *Community Healing Center* di Ponorogo merupakan hasil dari proses pemilihan lokasi secara komparatif yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya. Proses ini mempertimbangkan berbagai parameter, meliputi kesesuaian tata ruang, aksesibilitas, karakter sosial masyarakat, kondisi lingkungan, serta kedekatan dengan fasilitas pendukung.

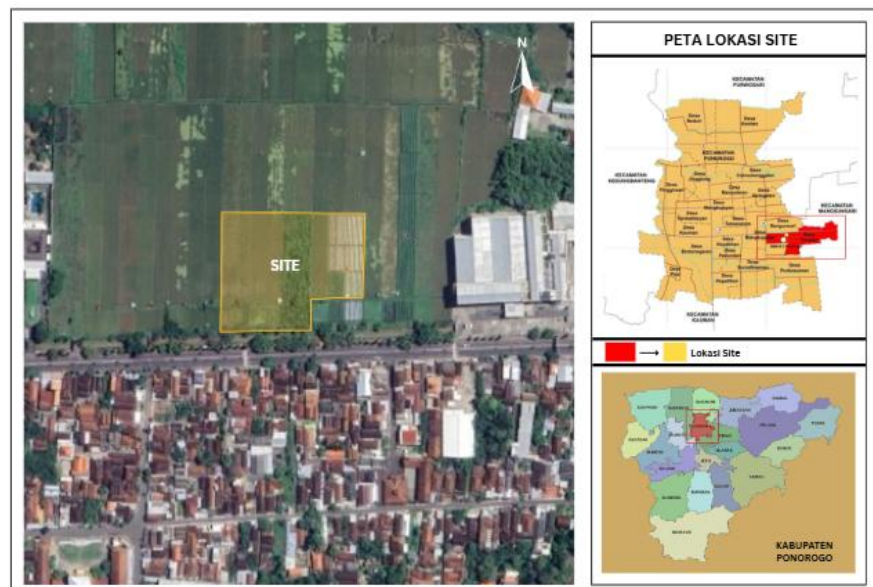
Berdasarkan hasil analisis terhadap dua alternatif tapak di Kelurahan Tonatan, alternatif tapak 1 dipilih karena memiliki tingkat kesesuaian paling optimal, terutama pada aspek aksesibilitas yang tinggi, kondisi lingkungan yang lebih tenang dan tidak padat, serta potensi pengembangan ruang yang mendukung konsep *healing environment*.

Dengan demikian, tapak terpilih dinilai mampu mengakomodasi kebutuhan perancangan *Community Healing Center* secara lebih komprehensif, baik dari aspek teknis, kontekstual, maupun konseptual.

3.6.1 Kondisi Eksisting Tapak

Tapak berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dengan luas 1.17 Ha (11.717,9 m²). Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo 2024–2044, lokasi tapak perencanaan berada pada zona kawasan permukiman perkotaan yang ditandai dengan warna *orange* pada peta rencana pola ruang, yang diperuntukkan bagi hunian dan fasilitas sosial. Meskipun saat ini masih berupa persawahan aktif, kawasan ini telah diarahkan untuk pengembangan kawasan terbangun sehingga secara regulatif sesuai untuk perancangan.

Lingkungan tapak berada pada zona transisi antara persawahan aktif di sisi utara–timur dan permukiman di sisi barat, sehingga memiliki fleksibilitas pengembangan sekaligus potensi menghadirkan suasana alami yang mendukung *healing environment*.



Gambar 3.10 Peta Lokasi Site

Sumber: Google Earth, 2026



Gambar 3.11 Tapak Perencanaan dan Batas-batasnya

Sumber: Google Earth, 2026

Tapak memiliki orientasi utama ke arah selatan yang menghadap koridor Jalan Ir. H. Juanda, sehingga memberikan keuntungan dalam aspek visibilitas dan pencapaian. Selain itu, orientasi ini juga berpotensi mendukung optimalisasi pencahayaan alami dan ventilasi silang pada bangunan. Akses masuk tapak terhubung langsung dengan jaringan jalan utama, sehingga memudahkan pergerakan pengguna serta meningkatkan keterjangkauan lokasi.

Karakter lingkungan yang relatif lebih tenang dan tidak padat. Keberadaan vegetasi alami serta ruang terbuka di sekitar tapak dapat dimanfaatkan sebagai elemen pendukung dalam menciptakan suasana yang lebih nyaman dan tidak menekan secara psikologis.

Dalam konteks perancangan *Community Healing Center* dengan pendekatan Desain Responsif Trauma, kondisi ini menjadi nilai strategis karena memungkinkan pengembangan ruang yang memiliki kualitas visual alami, tingkat kebisingan yang lebih terkendali, serta fleksibilitas dalam pengaturan zonasi berdasarkan kebutuhan privasi pengguna. Hal ini mendukung terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi proses pemulihan psikososial secara bertahap.

3.6.2 Potensi Tapak

1. Tapak berada pada koridor Jl. Ir. H. Juanda yang merupakan jalur penghubung menuju pusat Kota Ponorogo, sehingga memiliki tingkat aksesibilitas yang sangat baik. Kondisi ini memudahkan pencapaian dari berbagai arah serta mendukung fungsi bangunan sebagai fasilitas pelayanan publik dengan jangkauan pengguna yang luas.
2. Lingkungan sekitar tapak memiliki kelengkapan fasilitas perkotaan yang cukup tinggi, seperti permukiman, sekolah, apotek, SPBU, serta kedekatan dengan pusat aktivitas seperti *Ponorogo City Center*, GOR dan Stadion Ponorogo, serta gedung kesenian. Selain itu, keberadaan Jalan Suromenggolo di sisi timur yang difungsikan sebagai area *Car Free Day* menunjukkan tingginya aktivitas sosial masyarakat, sehingga berpotensi mendukung integrasi fungsi komunitas pada perancangan.
3. Tapak memiliki hubungan visual yang baik dengan lingkungan sekitar, terutama ke arah lahan persawahan aktif di bagian utara dan sebagian barat. Kondisi ini memberikan potensi suasana alami dan terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai elemen *healing environment*, seperti visual hijau, ketenangan, serta kualitas ruang luar yang mendukung proses pemulihan psikologis.
4. Keberadaan vegetasi alami serta lahan terbuka pada tapak memberikan peluang dalam pengembangan ruang terbuka hijau dan lanskap terapeutik. Selain itu, kondisi kawasan yang merupakan zona transisi antara area terbangun dan non-terbangun memungkinkan fleksibilitas dalam pengaturan zoning publik, semi privat, dan privat secara bertahap.

Seluruh potensi tapak tersebut menunjukkan bahwa lokasi memiliki kapasitas yang kuat dalam mendukung perancangan *Community Healing Center*, terutama dalam menciptakan keseimbangan antara aksesibilitas dan ketenangan lingkungan. Kombinasi antara kemudahan pencapaian, keberadaan elemen alam, serta aktivitas sosial di sekitar tapak memungkinkan terciptanya lingkungan yang suportif bagi proses pemulihan.

Potensi ini menjadi dasar dalam menerapkan pendekatan desain responsif trauma, khususnya dalam menghadirkan ruang yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga mampu memberikan rasa aman, kenyamanan sensorik, serta dukungan sosial bagi pengguna.

3.6.3 Permasalahan Tapak

Berdasarkan kondisi eksisting, tapak memiliki beberapa permasalahan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap kenyamanan psikologis pengguna, khususnya dalam konteks fasilitas pemulihan. Permasalahan yang teridentifikasi meliputi:

1. Akses tapak terhambat saluran drainase

Keberadaan saluran drainase di bagian depan tapak membatasi konektivitas langsung dengan jalan utama, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akses, menurunkan kenyamanan, serta mempengaruhi persepsi awal pengguna terhadap rasa aman saat memasuki kawasan.

2. Kebisingan dari jalan utama

Kedekatan tapak dengan koridor jalan utama menimbulkan paparan kebisingan yang dapat mengganggu aktivitas dengan kebutuhan ketenangan tinggi, seperti konseling dan terapi.

3. Kontrol stimulus lingkungan yang belum optimal

Tapak berada pada area transisi antara jalan utama, permukiman, dan persawahan, sehingga memiliki variasi stimulus lingkungan (visual, suara, aktivitas) yang belum terfilter dan berpotensi menyebabkan overstimulasi bagi pengguna.

4. Kondisi tanah lembab akibat lingkungan persawahan

Lingkungan sekitar yang didominasi area pertanian menyebabkan tingkat kelembaban tinggi yang berpengaruh terhadap kenyamanan termal dan kualitas ruang luar.

5. Belum adanya hirarki ruang dan transisi yang jelas

Kondisi tapak belum memiliki pembagian ruang bertahap dari area publik menuju area yang lebih privat, sehingga berpotensi menimbulkan

ketidaksiapan psikologis pengguna dalam mengakses ruang dengan tingkat privasi tinggi.

3.7 Gagasan Desain

3.7.1 Gagasan Desain Berdasarkan Tujuan 1

Parameter: Fasilitas Pemulihan Psikososial

1. Fasilitas Pemulihan

(Sub indikator: ruang konseling individu & kelompok, ruang terapi/relaksasi, ruang asesmen awal).

Fasilitas dirancang dalam beberapa massa bangunan yang merepresentasikan tahapan layanan psikososial, yaitu *intake*, asesmen, konseling, hingga terapi. Ruang konseling ditempatkan pada zona privat dengan pengendalian akustik, sedangkan ruang terapi dirancang fleksibel dengan suasana non-klinis dan menenangkan.

2. Ruang Interaksi Sosial Komunitas

(Sub indikator: ruang komunal, area duduk informal dan ruang diskusi).

Ruang interaksi sosial dihadirkan sebagai bagian dari proses healing melalui penyediaan area komunal yang bersifat informal dan fleksibel. Ruang ini ditempatkan pada zona dengan tingkat akses yang lebih terbuka, namun tetap terkontrol agar tidak mengganggu aktivitas pemulihan yang lebih privat.

3. Ruang Aktivitas dan Pengembangan Diri

(Sub indikator: ruang workshop, ruang edukasi kesehatan mental dan area kreatif).

Fasilitas aktivitas dirancang untuk mendukung terapi non-klinis melalui kegiatan produktif dan edukatif. Ruang bersifat fleksibel dan adaptif, sehingga dapat digunakan untuk berbagai aktivitas seperti pelatihan, edukasi kesehatan mental, dan kegiatan kreatif.

4. Keterhubungan dengan Alam

(Sub indikator: taman/RTH, visual ke alam, aktivitas *outdoor*).

Elemen alam diintegrasikan melalui penyediaan ruang terbuka dan hubungan visual antara ruang dalam dan luar. Pendekatan *multiple massa* memungkinkan terbentuknya ruang antar bangunan yang berfungsi sebagai area refleksi, relaksasi, dan aktivitas *outdoor*.

5. Zonasi dan Hirarki Ruang

(Sub indikator: pembagian publik–privat, alur aktivitas jelas).

Zonasi ruang disusun secara bertahap melalui pembagian massa menjadi tiga kelompok utama, yaitu publik, semi privat, dan privat. Setiap zona memiliki karakter ruang yang berbeda dan dihubungkan melalui sistem sirkulasi yang jelas, sehingga membentuk alur aktivitas yang mudah dipahami dan nyaman secara psikologis.

3.7.2 Gagasan Desain Berdasarkan Tujuan 2

Parameter: Desain Responsif Trauma

1. Keamanan dan Rasa Aman (*Safety*)

(Sub indikator: tata ruang mudah dipahami, visibilitas ruang baik dan sirkulasi udara).

Tata ruang dirancang sederhana dan intuitif melalui pengaturan massa dan sirkulasi yang jelas. Akses masuk dan pergerakan antar ruang dibuat mudah dipahami untuk mengurangi kebingungan dan meningkatkan rasa aman pengguna.

2. Kontrol Pengguna terhadap Ruang (*User Control*)

(Sub indikator: pilihan ruang privat/komunal, ruang refleksi dan variasi setting ruang.).

Ruang dirancang dengan variasi tingkat keterbukaan, mulai dari ruang komunal hingga ruang privat. Pengguna diberikan kebebasan untuk memilih ruang sesuai kondisi emosionalnya, termasuk ruang tenang untuk refleksi individu.

3. Privasi dan Ruang Tenang

(Sub indikator: ruang konseling privat, ruang relaksasi individu dan pemisahan zona).

Ruang dengan kebutuhan privasi tinggi ditempatkan pada zona yang lebih terlindungi dan terpisah dari area publik. Pengaturan ini bertujuan menjaga kenyamanan, ketenangan, dan kerahasiaan pengguna.

4. Kenyamanan Sensorik

(Sub indikator: pencahayaan alami, kontrol kebisingan, material & warna, sistem *wayfinding* yang jelas dan intuitif dan orientasi ruang yang mudah dipahami.).

Kenyamanan sensorik dicapai melalui pengendalian pencahayaan alami, kebisingan, serta penggunaan material yang menenangkan. Sistem orientasi ruang dirancang jelas untuk memudahkan navigasi tanpa menimbulkan stres.

5. Lingkungan yang Mendukung Pemulihan

(Sub indikator: elemen alam, suasana tenang dan kualitas ruang).

Lingkungan dirancang dengan karakter non-klinis, skala manusiawi, dan integrasi elemen alam. Pendekatan ini menciptakan suasana ruang yang tenang dan suportif terhadap proses pemulihan psikologis.